



1 Peratauran Umum:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar, dengan ketentuan setiap aitem pertanyaan, jawaban minimal 8 baris. Jawaban langsung di kerjakan di e-leraning: Jawaban yang diupload dalam bentuk PDF

2. Peraturan Khusus:

Bacalah perintah mengerjakan soalnya, jawaban langsung di E-learning, waktu mengerjakan 120 menit,tidak boleh di tulis tangan,tidak di perkenankan mencontek dari pihak manapun, tidak boleh mengkopi paste dari geogle atau dari manapun, jawaban harus rapi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya , sebelum di kirim di cek dulu.

1. Indonesia sekarang ini sedang menghadapi krisis moral yang mengakibatkan dosa besar Pendidikan terjadi di lingkungan sekolahan.
 - a. Bagaimanakah peran pemerintah dalam memerangi Dosa besar Pendidikan yang sekarang ini marak terjadi sebutkanlah dan jelaskanlah minimal 4 peran pemerintah.
 - b. Bagaimana peran lingkungan Masyarakat dalam memerangi Dosa besar Pendidikan tersebut sebutkanlah minimal 4 dan jelaskanlah.
2. Good and Clean Gaverment di Indonesia akan terwujud apabila tercipta kerja sama ke 3 pilar saling berkesinambungan jelaskanlah ke tiga(3) pilar tersebut.
3. Masyarakat Madani adalah Masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupan: Berikan minimal 4 alasan dan jelaskanlah apa yang menjadi faktor penyebab di zaman sekarang tidak terwujud Masyarakat Madani.
4. Salah satu instrumen untuk memerangi korupsi yang ada di Indiinesia Presiden sudah mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 - a. Apa yang menjadi penyebab gagalnya Gerakan Nasioanl Revolusi Mental tersebut sebutkanlah dan jelaskanlah minimal tiga (3) alasan tersebut
5. Ketahanan nasioanl adalah sikap bangsa Indonesia yang terintegrasi di segala aspek kehidupan negara.
 - a. Bagaimanakah pemerintah Indonesia mewujudkan Ketahanan Nasionalnya Jelaskanlah.
 - b. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam mewujudkan Ketahanan Nasioanl sebutkanlah dan jelaskanlah
 - c. Berikan contohnya tantangan menjadi peluang bagi Warga Negara untuk meningkatkan Ketahanan Nasional

Nama : Stevanus Andika Galih Setiawan
Kelas : RK231
NIM : 202303110008
Jawaban UAS PPKN Semester Ganjil 2023/2024

1.A.Adapun cara/Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memerangi dosa Pendidikan adalah sebagai berikut :

- Keterlibatan aktif Pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat sangatlah esensial.
- Upaya Pemerintah dapat berupa memberikan insentif kepada pendidik, seperti penghargaan dan kondisi kerja yang baik, guna meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran.
- Pengawasan yang ketat dan evaluasi terus-menerus menjadi hal penting untuk mencegah praktik-praktik korupsi di dalam sistem pendidikan.
- Peran Pemerintah mencakup penyediaan buku, materi ajar, dan teknologi pendukung guna mendukung pembelajaran berkualitas.
- Sebagai perancang kebijakan pendidikan, tugas Pemerintah adalah menyusun kurikulum yang relevan dan inklusif guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Perhatian Pemerintah difokuskan pada memastikan sarana dan prasarana pendidikan memadai, termasuk investasi dalam infrastruktur dan penyediaan materi ajar.
- Tanggung jawab Pemerintah mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan, penetapan standar kualitas, serta pencegahan praktik tidak etis.
- Pemerintah perlu memberikan insentif guna mengurangi praktik-praktik korupsi di bidang pendidikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif.

1. B. Adapun Peran masyarakat adalah sebagai berikut :

- Keterlibatan Komunitas: Melibatkan berbagai unsur dalam komunitas, seperti tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan LSM, dapat menciptakan dukungan yang luas untuk perbaikan sistem pendidikan.
- Dukungan Psikososial: Masyarakat dapat memberikan dukungan psikososial kepada siswa, guru, dan orangtua untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membantu mengatasi hambatan-hambatan pendidikan.
- Keterlibatan Komunitas: Melibatkan berbagai unsur dalam komunitas, seperti tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan LSM, dapat menciptakan dukungan yang luas untuk perbaikan sistem pendidikan.
- Penyebaran Informasi Positif: Memberikan informasi positif tentang pentingnya pendidikan dan dampak positifnya terhadap perkembangan individu dan masyarakat dapat menjadi peran masyarakat.
- Pemberdayaan Orangtua: Masyarakat memiliki potensi untuk memberdayakan orangtua agar lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, termasuk memantau perkembangan akademis dan mendukung kegiatan belajar di rumah.
- Pengawasan Kolaboratif: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap lembaga pendidikan dapat membantu mencegah praktik korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan.
- Partisipasi Aktif Masyarakat: Dengan memberikan dukungan pada program-program sekolah, seperti komite sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan pertemuan orangtua murid, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pendidikan.
- Upaya Pengentasan Kemiskinan: Partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat mengatasi salah satu hambatan utama dalam akses pendidikan. salah satu cara dapat dilakukan dengan pemberian gaji yang dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik, memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada tenaga pendidik, dan tidak membedakan tenaga didik yang sudah kompeten, maupun tenaga pendidik yang baru lulus.

2. 3 Pilar Utama dalam pemerintahan yang bersih dan baik adalah sebagai berikut :

- pemerintah memiliki peran utama dalam mengarahkan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan.
- sektor swasta menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan dengan menjadikan saham sektor non pertanian sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional. Mereka juga berperan sebagai penyedia utama lapangan kerja, serta berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan daerah
- masyarakat bukan hanya berpartisipasi, tetapi juga menjadi pemeran utama dalam proses pembangunan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengembangan dan penguatan kelembagaan agar masyarakat mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam menjalankan fungsi produksi dan konsumsinya. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi kebutuhan esensial untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksi mereka.

Adapun Lembaga negara pemerintahan yang saling berperan adalah :

- **Eksekutif:**
Menciptakan keterlibatan eksekutif yang bersih dan efisien, dipimpin oleh kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. Realisasi tata kelola yang baik dalam mengelola anggaran dan sumber daya negara. Menegakkan aturan dan hukum secara adil guna menciptakan lingkungan administrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.
- **Legislatif:**
Keterlibatan legislatif yang bertanggung jawab dalam merumuskan undang-undang yang mendukung tata kelola yang baik dan transparansi. Menegakkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, serta meninjau dan merevisi regulasi yang tidak efektif atau berpotensi menimbulkan penyimpangan.
- **Yudikatif:**
Pentingnya keberadaan yudikatif yang independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik untuk menjamin penegakan hukum yang adil. Meningkatkan kualitas pengadilan dengan mendukung pelatihan dan pengembangan para hakim, serta memastikan integritas sistem peradilan.

3. Beberapa alasan kenapa masyarakat madani sulit untuk berkembang di jaman modern seperti sekarang ini

- **Kurangnya Etika dan Moralitas:**
Kurangnya etika dan moral dalam masyarakat dapat menyebabkan perilaku tidak etis, menghambat terbentuknya masyarakat madani yang beradab. salah satu penyebab paling berpengaruh pada generasi zaman ini adalah gadget, dimana isi konten di gadget dapat berupa kekerasan, melawan dengan orang yang lebih tua, pornografi, dan masih banyak lagi. tidak semua konten bersifat positif dan mengedukasi.
- **Kurangnya Kesadaran Partisipasi:**
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapat menjadi penghalang bagi terwujudnya masyarakat madani yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga.
- **Kurangnya Pendidikan dan Informasi:**
Keterbatasan akses pendidikan dan informasi dapat menghambat perkembangan intelektual dan kesadaran masyarakat, yang menjadi dasar bagi masyarakat madani. Hal itu tidak dapat dipungkiri, saya pernah melihat sendiri, bagaimana anak kecil yang seharusnya masih mengeyam Pendidikan, justru harus turun langsung ke jalanin untuk Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya biasanya saya melihat pada pinggiran Ibukota DKI Jakarta. dan dapat dipungkiri lagi, bahwa kurangnya Pendidikan dan informasi ilmu masih banyak terjadi di perdalaman Indonesia, terlebih lagi akses internet dan kemudahan memperoleh informasi melalui buku/koran sangatlah sulit.
- **Tingginya Tingkat Diskriminasi:**
Diskriminasi terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan suku, agama, atau gender, dapat menjadi penghambat bagi terbentuknya masyarakat madani yang inklusif dan adil. Diskriminasi tidak hanya terjadi pada perbedaan status sosial, tetapi dapat terjadi pada agam, suku bangsa, warna kulit dan sebagainya. hal itu saya lihat dengan adanya penutupan beberapa gereja di Indonesia, dan pengusiran umat gereja pada saat sedang beribadah oleh beberapa “oknum” yang minim toleransi.
- **Ketidakamanan dan Konflik Sosial:**
Kondisi ketidakamanan dan konflik sosial dapat menghambat proses pembangunan masyarakat madani, menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di antara warganya.
- **Ketidaksetaraan Sosial:**
Faktor pemicu ketidaksetaraan sosial dapat menjadi penghalang bagi terwujudnya masyarakat madani. Kesenjangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan membatasi partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
- **Lemahnya Sistem Hukum:**
Kelemahan atau ketidakefektifan sistem hukum dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan impunitas, menghambat terciptanya masyarakat madani yang berkeadaban.
- **Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:**
Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi hambatan signifikan, menghambat terbentuknya masyarakat yang transparan, akuntabel, dan beradab.

4. Penyebab gagalnya Gerakan Nasional Revolusi Mental, disebutkan oleh beberapa factor sebagai berikut :

- **Minimnya Pemahaman Massal:**
Kegagalan Gerakan Nasional Revolusi Mental mungkin disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sasaran dan esensi gerakan tersebut, yang berdampak pada minimnya partisipasi dan dukungan.
- **Kurangnya anggaran:** Gerakan Nasional Revolusi Mental membutuhkan anggaran yang besar untuk mencapai tujuannya, namun anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi.
- **Kurangnya partisipasi:** Banyak orang yang tidak tertarik atau tidak peduli dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental, sehingga sulit untuk mencapai tujuan didirikannya Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- **Ketidakjelasan Program:**
Adanya perubahan kebijakan dan program yang tidak konsisten dari pemerintah dapat menghambat kelangsungan dan efektivitas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- **Keterbatasan Sumber Daya:**
Keterbatasan anggaran dan sumber daya, baik sumber daya berupa sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia untuk mendukung implementasi gerakan dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencapai perubahan sosial yang diinginkan.
- **Terbatasnya Keterlibatan Pendidikan:**
Terbatasnya keterlibatan sektor pendidikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai revolusi mental ke dalam kurikulum menjadi hambatan utama.
- **Isu Politisasi:**
Politisasi terhadap gerakan ini dapat mengakibatkan gangguan terhadap tujuan asli dan merendahkan tingkat kepercayaan masyarakat.
- **Evaluasi dan Monitoring yang Kurang Efektif:**
Sistem evaluasi dan pemantauan yang tidak efektif dalam mengukur kemajuan dan memberikan umpan balik dapat menghambat upaya perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

5.A.Adapun upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan nasional akan saya jabarkan sebagai berikut :

- Pendorong Kemandirian Ekonomi: Pemerintah Indonesia berusaha dan gencar dalam hal mendorong kemandirian ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan memperkuat yang sudah ada.
- Pembangunan Infrastruktur Berkualitas: Pemerintah Indonesia membangun infrastruktur berkualitas guna mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, baik perbaikan sarana dan prasarana yang ada di jalanin, maupun perbaikan monument/situs bersejarah/bangunan milik negeri, dan masih banyak lagi lainnya.
- Penguatan Pertahanan dan Keamanan: Pemerintah Indonesia memperkuat pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kualitas TNI dan Polri.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Pemerintah Indonesia meningkatkan mutu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
- Perkuatan Diplomasi: Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain dan mempertahankan kepentingan nasional.
- Pemeliharaan Lingkungan Hidup: Pemerintah Indonesia memperkuat ketahanan nasional dengan menjaga kualitas lingkungan hidup dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah Indonesia memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui upaya pendidikan dan pelatihan.

B. hambatan dan tantangan dalam mewujudkan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut :

- Konflik Sosial dan Politik: Konflik sosial dan politik dapat mengancam stabilitas internal, memerlukan usaha pencegahan dan penanganan konflik yang efektif.
- Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak ketahanan nasional dengan menggerogoti integritas lembaga-lembaga kunci dalam pemerintahan
- Ketergantungan pada Sumber Daya Asing: Ketergantungan pada sumber daya asing, terutama di sektor ekonomi dan energi, dapat membuat negara rentan terhadap tekanan dan manipulasi dari luar.
- Kerentanan Terhadap Bencana Alam: Kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap bencana alam menguji ketahanan nasional, membutuhkan sistem mitigasi dan respons yang lebih kuat.
- Konflik Sosial dan Politik: Konflik sosial dan politik dapat mengancam stabilitas internal, memerlukan usaha pencegahan dan penanganan konflik yang efektif.
- Disparitas Pembangunan Regional: Ketidaksetaraan pembangunan antar wilayah dapat menjadi kendala, karena mampu menciptakan ketidakseimbangan dalam ketahanan nasional yang

merugikan beberapa daerah.

- Ancaman Terorisme dan Radikalisme: Ancaman terorisme dan radikalisme menantang ketahanan nasional, memerlukan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan deradikalisasi untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan.
- Krisis Kesehatan Global: Pandemi atau krisis kesehatan global seperti yang terjadi pada COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan nasional juga tergantung pada kesiapan menghadapi ancaman kesehatan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bangsa.

C.

- Tantangan Teknologi dan Cybersecurity sebagai Peluang Pendidikan dan Keahlian: Ancaman teknologi dan siber menjadi peluang bagi warga negara untuk meningkatkan pendidikan di bidang teknologi dan keamanan siber, menciptakan SDM yang mampu mengatasi tantangan teknologi modern.
- Kerentanan Terhadap Bencana Alam sebagai Peluang Keberlanjutan Lingkungan: Kerentanan terhadap bencana alam membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam usaha pelestarian lingkungan, manajemen risiko bencana, dan restorasi ekosistem.
- Ketergantungan pada Sumber Daya Asing sebagai Peluang Diversifikasi Ekonomi: Ketergantungan pada sumber daya asing bisa menjadi dorongan bagi warga negara untuk mendukung diversifikasi ekonomi, menggalakkan industri lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya eksternal.
- Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai Peluang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Tantangan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menjadi peluang bagi warga negara untuk mendukung transparansi, mengawasi pemerintahan, dan mempromosikan etika kepemimpinan.
- Konflik Sosial dan Politik sebagai Peluang Dialog dan Konsolidasi Demokrasi: Konflik sosial dan politik dapat diubah menjadi kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam dialog, memperkuat prinsip demokrasi, dan mencari solusi inklusif untuk meningkatkan stabilitas politik.
- Ancaman Terorisme dan Radikalisme sebagai Peluang Keterlibatan Masyarakat: Ancaman terorisme dan radikalisme dapat menginspirasi warga negara untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, edukasi, dan penanggulangan ekstremisme, yang pada gilirannya menjaga keharmonisan sosial.
- Ketidaksetaraan Pembangunan sebagai Peluang Pemberdayaan: Tantangan ketidaksetaraan pembangunan membuka pintu bagi partisipasi aktif warga negara dalam program pemberdayaan ekonomi lokal, serta berkontribusi pada upaya mengurangi kesenjangan wilayah.
- Krisis Kesehatan Global sebagai Peluang Peningkatan Kesadaran Kesehatan: Krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, kebersihan, dan berpartisipasi dalam langkah-langkah pencegahan dan mitigasi.

